

INOVASI MODEL PEMBELAJARAN SEBAGAI UPAYA INTERNALISASI NILAI ANTI KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI

Jelita Vanessa Cahya Fortuna
jelitavanessa022@gmail.com
Universitas Bandar Lampung

ABSTRAK

Korupsi merupakan masalah sosial yang serius di Indonesia. Korupsi yang terjadi di Negara Indonesia sudah akut sehingga sulit untuk disembuhkan. Upaya pemerintah untuk mencegah dan memberantas korupsi perlu didukung oleh langkah – langkah preventif jangka panjang, salah satunya pendidikan. Perguruan tinggi memiliki peran penting untuk membentuk karakter mahasiswa menjadi warga negara yang jujur dan berintegritas. Artikel ini membahas mengenai peran perguruan tinggi dalam mengembangkan budaya anti korupsi melalui pendidikan. Saat ini, pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi belum optimal dan perlu ditingkatkan. Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat mengandalkan semata-mata pada upaya penindakan yang menjadi kewenangan institusi penegak hukum. Kurikulum anti korupsi perlu diintegrasikan secara menyeluruh dan dilengkapi dengan metode pembelajaran yang relevan. Partisipasi mahasiswa dan program – program penyebaran budaya anti korupsi juga perlu ditingkatkan melalui dukungan dan insentif. Partisipasi mahasiswa dalam program anti korupsi masih rendah, padahal keterlibatan aktif penting untuk membentuk kesadaran anti korupsi sejak dini. Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai – nilai anti korupsi. Untuk itu optimalisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah upaya untuk menumbuhkan budaya anti korupsi bagi mahasiswa dan masyarakat. Artikel ini bertujuan menganalisis kondisi Pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi serta memberikan rekomendasi mengenai langkah – langkah pengembangan budaya anti korupsi secara lebih komprehensif dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan generasi muda dapat turut berperan dalam upaya mencegah terulangnya korupsi di masa depan.

Kata Kunci: Korupsi, Pendidikan Karakter, Perguruan Tinggi, Budaya Anti Korupsi.

ABSTRACT

Corruption is a serious social problem in Indonesian. Government efforts to prevent and eradicate corruption need to be supported by long-term preventive measures, one of which is education. Universities have an important role in shaping the character of students to become honest and integrity-based citizens. This article discusses the role of universities in developing an anti-corruption culture through education. Currently, anti-corruption education in universities is not optimal and needs to be improved. The anti-corruption curriculum needs to be integrated comprehensively and equipped with relevant learning methods. Student participation and programs to spread anti-corruption culture also need to be improved through support and incentives. Student participation in anti-corruption programs is still low, even though active involvement is important to form anti-corruption awareness from an early age, this article aims to analyze the condition of anti-corruption education in universities and provide recommendations on steps to develop an anti-corruption culture more comprehensively and sustainably. Thus, it is hoped that the younger generation can play a role in efforts to prevent the recurrence of corruption in the future.

Keywords: Corruption, Character Education, Higher Education, Anti-Corruption Culture.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah sosial yang telah lama menghambat pembangunan di Indonesia. Berdasarkan data KPK, tercatat 11,4% kasus korupsi melibatkan pelaku di bawah usia 35 tahun. Angka ini menunjukkan perlu adanya upaya pencegahan sejak dini,

salah satunya melalui pendidikan anti korupsi. Selain itu, tercatat data di KPK bahwa banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum – oknum pemerintah dan pejabat negeri. Korupsi tidak hanya merugikan negara dalam bentuk kerugian keuangan, tetapi juga merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Oleh karena itu, perlu upaya nyata untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi. Survei Transparansi Internasional juga menunjukkan skor persepsi korupsi Indonesia masih rendah pada angka 38. Meskipun pemerintah terus berupaya melalui regulasi dan penegakan hukum, dampaknya belum signifikan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan multidimensional termasuk pendidikan. Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan strategis memegang peran besar dalam membentuk karakter calon pemimpin bangsa. Evaluasi menyebutkan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi belum memadai. Materi anti korupsi hanya terdapat pada 1-2 mata kuliah dan tidak teintegrasi dengan kurikulum umum.

Masifnya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia baik pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, bahkan pemerintah di tingkat desa untuk saat ini sangat penting dilakukannya pendidikan anti korupsi. Tentunya korupsi dapat dikatakan sebagai pemberi sumbangsih yang signifikan bagi tersungkurnya bangsa ke jurang kehancuran. Ironisnya, korupsi juga terjadi pada lembaga negara yang dekat dengan Tuhan karena mengurus serta sangat memahami tentang agama, bahkan dana sosial kemanusiaan untuk bencana nasional tak luput menjadi proyek yang dikorupsi. Masyarakat harus mengetahui besarnya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi tersebut, seperti pendidikan menjadi mahal, pelayanan kesehatan menjadi mahal, transportasi menjadi tidak aman, rusaknya infrastruktur dan yang paling berbahaya adalah meningkatnya angka pengangguran sehingga berkolerasi kepada angka kriminalitas. Rendahnya moralitas mengakibatkan profesionalisme dan terjadi ketidakmauan penegak hukum merupakan masalah yang serius bagi penegak hukum karena dapat merusak reputasi dan kepercayaan penegak hukum di mata masyarakat (Budi Rizki, 2020). Pihak penegak hukum banyak melakukan aksi pungli kepada masyarakat karena banyak faktor yang mempengaruhi para penegak hukum sehingga dapat melakukan tindakan tersebut yang dimana tindakan tersebut sangat melanggar undang – undang (Maruapey, 2017). Tindakan yang dapat dilakukan para penegak hukum agar dapat mengurangi atau menghilangkan tindakan korupsi, pemungutan liar, dan segala tindakan yang merugikan kepada masyarakat.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku korupsi, misalnya kebebasan media. Hubungan antara kebebasan media dan korupsi paling kuat di negara – negara dengan sistem parlementer daripada di negara – negara dengan sistem presidensial (Camaj, 2012). Pendapat lain menyebutkan bahwa tingkat pengguna (pendidikan, PDB), tata kelola, regulasi (regulasi pasar dan kredit), dan variabel kontrol lainnya (kebebasan pers dunia, hak politik, kebebasan sipil) sebagai faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku korupsi (Lee et al., 2018). Selanjutnya secara jelas Subagio merumuskan 5 (lima) faktor utama penyebab korupsi, diantaranya faktor politik, sistem yang tidak efektif, insentif atau tekanan finansial, lemahnya penegakan hukum dan kurangnya integritas (Subagio, 2016).

Metode penyampaian juga lebih bersifat teoritis daripada praktik. Padahal, karakter juga dibangun melalui pengalaman yang nyata. Survei internal menunjukkan 64% mahasiswa kurang memahami dampak korupsi. Pembekalan perlu diperkaya dengan konteks sosial, ekonomi, dan perkembangan zaman. Partisipasi mahasiswa dalam program penyebaran budaya anti korupsi juga rendah. Diperlukan insentif yang mendorong keterlibatan aktif guna membangun kesadaran anti korupsi sejak dini. Substansi dan

metode penelitian perlu inovatif dan terintegrasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif dari perguruan tinggi untuk mengembangkan budaya anti korupsi secara berkelanjutan guna mencegah korupsi di masa mendatang. Pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi bertujuan untuk membangun budaya anti korupsi sejak dini di kalangan mahasiswa. Mahasiswa adalah generasi penerus yang akan terlibat langsung dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, dan pemerintahan. Penting bagi mereka untuk memiliki pemahaman dan komitmen yang kuat terhadap penanggulangan korupsi. Melalui kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan pengembangan karakter, pendidikan anti korupsi ini dapat menanamkan nilai – nilai anti suap, transparansi, akuntabilitas, dan integritas.

Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi bertanggung jawab mendidik calon pemimpin bangsa yang berintegritas dan anti korupsi. Partisipasi mahasiswa dalam organisasi anti korupsi perlu didorong untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan. Kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat dalam advokasi dan pencegahan korupsi perlu ditingkatkan. Jurnal ini akan mengkaji upaya – upaya yang dilakukan beberapa perguruan tinggi dalam membangun budaya anti korupsi melalui pendidikan. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan masukan bagi peningkatan program Pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi untuk mendukung penanggulangan korupsi secara nasional. Fenomena korupsi yang masih terjadi di berbagai sektor membutuhkan pendekatan multidisiplin. Isu korupsi menjadi bayangan yang masih mengancam pembangunan bangsa dengan budaya jujur dan bersih dari praktik – praktik koruptif. Pendidikan merupakan wadah untuk mengembangkan potensi manusia dengan membentuk kecerdasan sesuai amanat pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 serta berusaha untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang mampu mengubah kualitas masyarakat Indonesia untuk dapat memiliki moral dan sikap dalam memajukan mutu pendidikan. Pendidikan berperan besar dalam membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk mendidik generasi muda bahwa korupsi merupakan tindakan yang tidak boleh ditoleransi. Praktik korupsi belum berhasil diatasi hanya dengan melalui pendekatan hukum dan penegakan hukum. Dibutuhkan pendekatan multidimensional termasuk melalui pendidikan. Perguruan tinggi dituntut untuk menginternalisasi nilai – nilai anti korupsi di kalangan mahasiswa. Upaya pemerintah untuk mendorong pendidikan karakter anti korupsi melalui Permendikbud belum semuanya terealisasi di perguruan tinggi. Perlunya pendekatan holistik dan komprehensif, bukan hanya sosialisasi secara informal. Perlu dilakukan pendalaman materi, aktivitas, hingga penilaian terkait masih dibutuhkannya peran aktif di perguruan tinggi sebagai garda terdepan pembangunan budaya anti korupsi melalui pendidikan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Jurnal ini bertujuan mengidentifikasi persepsi dan pemahaman terkait budaya anti korupsi yang dibangun di perguruan tinggi dan untuk memperoleh gambaran mendalam tentang pencegahan budaya anti korupsi. Penelitian ini menggunakan metode wawancara, dimana mengumpulkan data – data untuk mengetahui langkah – langkah yang telah dilakukan oleh perguruan tinggi dalam membangun budaya anti korupsi. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur sehingga memiliki pedoman wawancara yang jelas dan terarah pada tujuan penelitian. Wawancara dilakukan secara personal dan pedoman wawancara berisi pertanyaan yang terkait tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi merupakan penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Beberapa bentuk korupsi antara lain suap menyuap, penggelapan dana negara, benturan kepentingan, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang. Korupsi menyebabkan kerugian besar bagi negara, ekonomi, dan masyarakat. Dampaknya antara lain menurunkan investasi, layanan publik yang tidak merata, pembangunan yang tidak tepat sasaran, peningkatan biaya transaksi bisnis, perekrutan sumber daya manusia yang buruk, dan penurunan daya saing di kawasan. Upaya yang dapat dilakukan yaitu adanya pendidikan anti korupsi, peningkatan akuntabilitas lembaga, penegakan hukum yang tegas, reformasi birokrasi, partisipasi masyarakat, dan kerja sama Internasional dalam penanggulangan korupsi.

Praktik korupsi berdampak buruk bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Secara ekonomi, korupsi mengakibatkan penurunan investasi karena biaya transaksi meningkat. Apabila dana negara digelapkan oleh oknum yang melakukan tindak korupsi, maka belanja publik untuk bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan akan berkurang. Dampak sosialnya, korupsi menimbulkan ketidakadilan dan melemahkan good governance. Layanan publik pun menjadi tidak merata karena dipengaruhi oleh suap atau nepotisme. Untuk mencegah dan memberantas korupsi, perlu dilakukan berbagai upaya. Pemerintah harus meningkatkan akuntabilitas aparat dengan menyempurnakan sistem pengawasan. Masyarakat perlu dididik untuk tidak menyuap dan melapokan tindak korupsi yang terjadi. Kerjasama antar lembaga anti korupsi pun perlu ditingkatkan. Dengan upaya multisektoral, diharapkan korupsi dapat ditekan secara berkelanjutan. Korupsi juga mempengaruhi kualitas infrastruktur. Uang proyek sering digelapkan sehingga pembangunan tidak sesuai target atau kualitasnya rendah. Misalnya pada proyek pembangunan jalan, jembatan, bendungan, atau rumah sakit. Padahal biaya proyek melebihi anggaran semula. Korban utamanya adalah masyarakat yang berhak menikmati fasilitas publik berkualitas. Oleh karena itu, perlu berbagai upaya untuk mencegah dan menindak pelaku korupsi di semua level pemerintahan.

Di perguruan tinggi, korupsi juga terjadi dalam pengadaan barang atau proyek kampus misalnya pengadaan alat praktikum, pembangunan gedung, atau proyek penelitian. Sering terjadi kolusi pengadaan yang tidak transparan. Selain itu, nepotisme atau proteksi kerabat dalam rekrutmen dosen, karyawan, mahasiswa atau penugasan akademik seperti kepanitiaan. Akses tidak adil diberikan ke kerabat atau kelompok tertentu. Benturan kepentingan juga sering terjadi karena dosen atau pejabat kampus yang bekerja di luar yang dapat mempengaruhi kebijakan di kampus. Penggelapan dana hibah, bantuan, atau penelitian dengan menyimpan sebagian untuk kepentingan pribadi serta gratifikasi berupa makanan, tiket, atau THR yang diberikan mahasiswa kepada dosen tapi tidak seimbang dengan kinerja.

Pendidikan Anti Korupsi merupakan upaya pemerintah untuk memberantas korupsi secara sistematis menurut sistem yang sudah ada, karena saat ini perilaku korupsi belum dapat dihentikan secara maksimal. Dengan adanya budaya anti korupsi di masa depan. Korupsi semakin banyak terjadi di setiap sektor kehidupan masyarakat saat ini. Untuk mencapai tujuan yang efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi undang – undang telah menetapkan ancaman pidana umum khusus, dan pidana denda yang lebih tinggi bahkan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana, di dalam undang – undang yang ditetapkan sebagai pidana penjara kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Korupsi dalam pendidikan sering dimulai dari proses penerimaan mahasiswa baru.

Mahasiswa baru diminta memberikan uang suap agar bisa lolos seleksi masuk walaupun tidak memenuhi syarat akademik. Uang ini diterima oleh panitia seleksi atau petugas kampus. Korupsi juga terjadi dalam proses penerimaan mahasiswa transfer dengan modus serupa. Setelah menjadi mahasiswa aktif, korupsi berlanjut dalam proses perkuliahan. Mahasiswa memberikan uang atau hadiah kepada dosen agar mendapat nilai tinggi meskipun prestasinya pas – pasan. Korupsi juga terjadi dalam penyusunan daftar nama mahasiswa penerima beasiswa, penyalahgunaan dana beasiswa, serta bantuan biaya kuliah lainnya. Terkadang kerabat mahasiswa yang terpilih kurang berhak menerima bantuan tersebut, sedangkan yang benar – benar membutuhkan tidak mendapatkan bantuan tersebut. Setelah tamat kuliah, korupsi berlanjut dalam proses penetapan gelar dan penerbitan ijazah yang tidak sesuai hanya untuk kepentingan pribadi.

Menurut pandangan dosen, bagaimana model pembelajaran seperti apa yang tepat diterapkan supaya mahasiswa dapat menginternalisasikan nilai anti korupsi secara optimal ?

Hasil wawancara :

Beberapa dosen yang telah saya wawancara di perguruan tinggi memiliki pandangan bahwa pembelajaran berbasis masalah sangat tepat mendorong internalisasi nilai anti korupsi pada diri mahasiswa. Dengan menggunakan kasus nyata yang terjadi di masyarakat, mahasiswa akan lebih terlibat untuk mencari Solusi bersama secara mandiri maupun berkelompok. Selain itu, penugasan riset tindakan juga dilakukan, misalnya survei integritas di internal kampus. Selain mendalami tentang topik, proses riset membiasakan mahasiswa bekerja sama dengan etika tinggi. Dengan pengalaman nyata dalam menyelesaikan masalah korupsi secara sistematis dan akuntabel, diharapkan anti korupsi menjadi nilai internal mahasiswa seiring mereka bertumbuh menjadi warga negara yang baik. Pembelajaran berbasis proyek yang dirancang mahasiswa sendiri sangat memotivasi mereka untuk mewujudkan nilai anti korupsi secara praktis. Misalnya, kelompok mahasiswa merancang kampanye anti – gratifikasi di lingkungan kampus atau masyarakat sekitar. Mereka harus memecahkan masalah strategi komunikasi, teknis pelaksanaan, hingga evaluasi dampak secara mandiri.

Generasi muda sangat identik dengan perubahan dan bahkan kerap menjadi motor bagi perubahan itu sendiri. Pemuda memiliki suatu potensi sebagai agent of change atau agen perubahan. Potensi ini terlihat dalam idealism dan integritas murni dari generasi muda dalam menyikapi permasalahan – permasalahan sosial. Salah satu sasaran pemberian Pendidikan Anti Korupsi kepada generasi muda diberikan kepada mahasiswa atau orang yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Secara yuridis landasan yang digunakan dalam memberikan Pendidikan Anti Korupsi kepada mahasiswa yaitu melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Pemberian Pendidikan Anti Korupsi tentu sangat efisien bilamana diberikan kepada seluruh jenjang pendidikan, khususnya generasi muda tidak hanya kalangan mahasiswa akan tetapi juga peserta didik pada jenjang SMA/Sederajat. Mengingat Pendidikan Anti Korupsi kepada mahasiswa diberikan dalam mata kuliah tersendiri dengan bobot 2 SKS atau di sisipkan dalam mata kuliah Pancasila atau Pendidikan Kewarganegaraan maka pemberian Pendidikan Anti Korupsi kepada peserta didik SMA/Sederajat harus diberikan dalam bentuk mata pelajaran tersendiri.

Selain itu, metode presentasi kelompok tindakan anti – korupsi juga bisa dimanfaatkan. Misalnya dengan membuat poster, video animasi, atau aplikasi edukatif. Hadiah akan diberikan kepada karya terbaik. Diskusi panel internalisasi juga dinilai

efektif, dengan mengundang narasumber dari berbagai latar seperti penegak hukum, akademisi, atau LSM yang bergerak di bidang ini. Partisipasi langsung dari mahasiswa dalam program – program nyata merupakan kunci utama internalisasi nilai anti korupsi. Salah satunya dengan mengikutsertakan mahasiswa sebagai instruktur di sekolah – sekolah untuk mengajar tentang pentingnya integritas dan anti – suap. Mahasiswa akan belajar bagaimana merancang dan menyampaikan materi secara kreatif dan menarik. Pembelajaran berbasis masalah dengan kasus nyata korupsi juga salah satu cara yang efektif. Mahasiswa dapat diberikan kasus suap di sebuah lembaga pemerintahan kepada kelompok mahasiswa untuk dianalisis. Mahasiswa dituntut untuk mencari akar permasalahan, dan rekomendasi perbaikan secara sistematis menggunakan pendekatan multidisiplin.

Bisa juga dengan mengadakan simulasi peradilan kasus korupsi. Dimulai dari tahap investigasi oleh mahasiswa yang berperan sebagai investigator hingga persidangan di pengadilan. Mahasiswa akan belajar tahapan proses hukum secara utuh mulai dari pengumpulan barang bukti, pemanggilan saksi, pemeriksaan terdakwa, sidang pertama, hingga putusan akhir. Beberapa mahasiswa lainnya juga berperan sebagai hakim, jaksa, advokat, saksi, dan terdakwa. Untuk menunjang aktivitas ini, para dosen bisa mengundang narasumber dari pihak kejaksaan dan peradilan yang bersedia memberikan pengarahan dan bantuan sesuai kebutuhan. Simulasi ini bisa dilakukan dua sampai tiga kali pertemuan dengan ditutup diskusi refleksi secara mendalam. Model pembelajaran seperti ini dianggap jauh lebih efektif dibanding dengan cara konvensional. Mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga bisa merasakan prosesnya secara nyata. Hal ini akan memperkuat internalisasi nilai anti korupsi.

Evaluasi mengenai pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk mengetahui sejauh mana budaya anti korupsi di perguruan tinggi. Pertama, mahasiswa perlu menilai bagaimana efektivitas penanaman nilai anti korupsi melalui kurikulum perkuliahan. Kedua, mahasiswa mengidentifikasi apakah masih terjadi tindakan korupsi seperti suap tugas di lingkungan kampus. Ketiga, mahasiswa perlu memastikan bahwa seluruh mahasiswa dan karyawan kampus patuh terhadap aturan anti korupsi yang berlaku. Selain itu, mahasiswa juga perlu mengevaluasi sistem pengaduan pelanggaran yang ada agar lebih akuntabel. Dengan evaluasi yang komprehensif, diharapkan budaya anti korupsi bisa terus ditingkatkan di lingkungan perguruan tinggi. Salah satu aspek yang penting untuk dievaluasi adalah partisipasi mahasiswa dalam mendeteksi dan melawan tindakan korupsi.

Sebagai generasi milenial, mahasiswa memiliki peran besar untuk terlibat secara aktif dalam gerakan anti korupsi. Oleh karena itu, mahasiswa perlu mengetahui tingkat keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan relawan anti suap maupun kelompok anti korupsi di lingkungan perguruan tinggi. Evaluasi ini penting untuk mengetahui sejauh mana kesadaran dan semangat mahasiswa dalam mencegah tindakan korupsi. Evaluasi lain yang disarankan yaitu terkait transparansi pengelolaan dana di perguruan tinggi. Apakah data anggaran dan penggunaannya bisa diakses dengan mudah oleh seluruh civitas akademika atau tidak. Hal ini dapat mencegah potensi korupsi dalam pengelolaan keuangan di perguruan tinggi. Dengan berbagai aspek evaluasi, diharapkan budaya anti suap dapat lebih tumbuh dan berkembang di lingkungan perguruan tinggi. Salah satu aspek yang juga penting untuk dievaluasi adalah efektivitas system pelaporan dan penanganan pelanggaran anti korupsi di lingkungan perguruan tinggi. Sebagai mahasiswa perlu mengetahui apakah mekanisme pengaduan pelanggaran seperti whistleblowing system telah berjalan dengan baik atau masih menghadapi hambatan. Apakah laporan dari masyarakat maupun

mahasiswa bisa ditindaklanjuti secara adil dan wajar, evaluasi ini penting untuk mengetahui tingkat akuntabilitas pengelolaan pengaduan. Evaluasi lain yang juga relevan adalah menilai dampak dari sosialisasi nilai – nilai anti suap ke masyarakat sekitar kampus. Selain itu, apakah mahasiswa sudah menginternalisasikan budaya ini atau masih terdapat kesenjangan pemahaman ? Hal ini dapat menjadi masukan bagi perguruan tinggi untuk menyempurnakan sosialisasi ke depan. Evaluasi terhadap peningkatan kualitas pendidikan anti korupsi merupakan aspek penting. Perguruan tinggi diharapkan senantiasa menyempurnakan kurikulum dan metode pembelajaran agar penanaman nilai – nilai integritas semakin efektif. Evaluasi terhadap kualitas pendidikan anti korupsi perlu dilakukan dengan menggunakan indeks keberhasilan belajar mahasiswa dan umpan balik dari berbagai pihak. Selain itu, partisipasi tenaga pengajar dalam meningkatkan kompetensi di bidang anti korupsi juga dapat menjadi tolak ukur.

KESIMPULAN

Pendidikan Anti Korupsi merupakan upaya pencegahan terjadinya perbuatan korupsi, sebagai pendidikan nilai dan karakter, pendidikan anti korupsi tentu menjadi salah satu faktor yang besar pada pengembangan aspek sikap generasi muda. Salah satu sasaran pemberian Pendidikan Anti Korupsi kepada generasi muda diberikan kepada mahasiswa. Mahasiswa mampu melakukan gerakan – gerakan atau implementasi Pendidikan Anti Korupsi dengan menjadi penggerak dapat dilakukan dengan mengkampanyekan gerakan anti korupsi. Pelaksanaan kampanye dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dengan menggunakan sosial media melalui video animasi, poster, foto, ataupun yang lain. Mengingat masyarakat Indonesia sekarang khususnya generasi muda tidak dapat lepas pemanfaatan teknologi melalui media sosial.

Saran

Saran dari hasil penelitian pendidikan anti korupsi melalui metode wawancara ini antara lain menerapkan pembelajaran partisipatif seperti simulasi, studi kasus nyata, dan kunjungan lapangan untuk keterlibatan aktif mahasiswa. Selain itu, melakukan evaluasi berkala secara terbuka dan independent dengan hasil yang jelas, mewujudkan kampus bebas suap sebagai contoh tata kelola yang bersih dan akuntabel, meningkatkan kualitas pendidikan integritas melalui inovasi kurikulum dan metode pembelajaran, dan mendorong keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi baik sebagai relawan maupun pengawas pelaksanaan program.

DAFTAR PUSTAKA

- (Komisi Pemberantasan Korupsi), Journal of Development and Social Change, Vol. 1, No. 2, October 2018: P.178-190p-ISSN 2614-5766,<https://jurnal.uns.ac.id/jodasc>
- Abdul Karim, Peran Mahasiswa Dalam Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi
- Ahmad Zuber, 2018, Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Formal dan KPK
- Eko Sujadi, Muhd. Odha Meditamar, Hengki Yandri, M. Eval Setiawan, Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Karakter: Kebijakan dan Praktik di Indonesia, Malaysia, dan Singapura
- Ita Suryani, Penanaman Nilai Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi, Ita Suryani: Penanaman Nilai Anti Korupsi di Perguruan Tinggi
- Nida Amalia Dewi, Dedi, Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi, Vol. 1, No. 1, 2022, ISSN: 2964-5107
- Putra Perdana Ahmad Saifulloh, Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi di Indonesia, Vol. 47, No. 4, 2023
- Zainudin Hasan, Aqshal Azan Putra Salim, Salsabila Brillianti Sarene, Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum, Jurnal

- Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Volume 03, No. 03 Juli 2023 (828-831), e-ISSN: 2798-5210, p-ISSN: 2798-5652
- Zainudin Hasan¹ Ahmad Qunaifi² Agel Pratama Andika³ Dimas Disa Pratama⁴ Salsabila Mindari⁵ , Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Karakter Anak Bangsa, JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology, E-ISSN: 3032-2758 P-ISSN: 3032-3495, Vol. 1, No. 2 Juli 2024
- Zainudin Hasan¹ Bagas Satria Wijaya² Aldi Yansah³ Rian Setiawan⁴ Arya Dwi Yuda⁵, Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Korupsi Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa, Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Volume. 2, No. 2, Juni 2024, e-ISSN: 2988-5213, dan p-ISSN: 2988-7747, Hal. 241-255, DOI: <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1883>
- Zenda Vidya Uttamo; Muhammad Zainuddin, Peran Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Generasi Muda (Prespektif Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi).